

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM
REGIONAL, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2013-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU EKONOMI ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**IBNU MUNTAHA
19108010113**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYAR'IAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DEB/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM REGIONAL, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU MUNTAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 19108010113
Telah diujikan pada : Kamis, 25 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 666930ded040b

Ketua Sidang

Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.

SIGNED



Valid ID: 6667b2ca27623

Penguji I

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.

SIGNED



Valid ID: 6666e9ab15555

Penguji II

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 666947652396c

Yogyakarta, 25 April 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ibnu Muntaha
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : Ibnu Muntaha
NIM : 19108010113
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.
Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Pembimbing


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19821009 201503 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Muntaha
NIM : 19108010113
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam body note dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

un,
METER
TEMPEL
10116
Muntaha



**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Muntaha
NIM : 19108010113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (non-ekklusive royalty free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Penyusun,



Ibnu Muntaha

HALAMAN MOTTO

“SABAR, TENANG, NIKMATI, FOKUS PADA TUJUAN”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang selalu
tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Ayahanda Abdurrochman dan Ibunda Mangisah yang tiada hentinya mendukung dan memotivasi saya agar senantiasa berjuang untuk menjadi putra kebanggaan keluarga, bangsa dan negara.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada saya.

Terima kasih kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan saya kesempatan dan ruang belajar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan angkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua ta' marbuthah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal maupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ^ا ---	Fathah	Ditulis	A
--- _ا ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ^و ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Panjang

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apsrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huurf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Ekonomi Kota Dumai”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

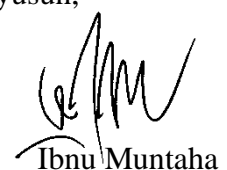
1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin., MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak PROF. DR. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.AS. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah mengarahkan dan membimbing skripsi ini serta memberikan masukan kepada saya sampai akhir, sehingga skripsi ini tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada penyusun, terkhusus dosen Program Studi Ekonomi Syariah.

7. Seluruh karyawan tata usaha umum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan penyusun, serta karyawan tata usaha bagian keuangan yang sudah memberikan pengalaman baru bagi penyusun dalam hal non akademik.
8. Keluarga tercinta, Ayahanda Abdurrochman dan Ibunda Mangisah yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moral maupun material serta do'a yang tidak pernah putus kepada penyusun, sehingga penyusunan ini berjalan dengan baik.
9. Segenap keluarga besar Kontrakan nusantara yaitu Alfian, Wawan, Mirza, Joo, Awal, Peted, Ozi, Mustofa, yang selalu mendukung saya saat menyusun penelitian ini hingga selesai.
10. Sahabat Qnq Istimewa Aan , Fathur, Arju, Ima, Galih, Salsa, Izul, Rima dan Syazi yang telah memberikan dukungan doa dan semangat yang tidak pernah terputus setiap harinya.
11. ES 2019 yang telah kebersamai dalam proses belajar di UIN Sunankalijaga.
12. Segenap teman- temann KKN Wonosalam, yang telah mendukung penyusun saat menyusun penelitian ini.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan do'a, motivasi, dan terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Saya sebagai penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga pihak-pihak yang nantinya melakukan penelitian yang sama.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Penyusun,



Ibnu Muntaha

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Indeks Pembangunan Manusia	13
2. Pengeluaran pemerintah	24
3. Upah Minimum Regional (UMR)	27
4. Kemiskinan	32
B. Telaah Pustaka	35
C. Pengembangan Hipotesis	39
D. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber data	48

C.	Definisi Oprasional Variabel.....	49
1.	Variabel dependen	49
2.	Variabel Independen	50
D.	Metode Analisis	53
1.	Uji Statistik Deskriptif	53
2.	Analisis Regresi Data Panel	54
3.	Metode Estimasi	54
4.	Uji Pemilihan Model Penelitian	56
5.	Uji Asumsi Klasik.....	60
6.	Uji Statistik.....	63
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		66
A.	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	66
B.	Analisis Data Penelitian	67
1.	Analisis Diskriptif.....	67
2.	Estimasi Model Regresi Data Panel	70
3.	Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi	71
4.	Analisis Hasil Regresi Data Panel	74
5.	Hasil Uji Statistik.....	76
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusi Provinsi Jawa Tengah 2015-2022.....	4
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2015-2022.....	7
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	24
Tabel 2.2 Telaah Pustaka Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Statistik Diskriptif	65
Tabel 4.2 Common Effect Model (CEM)	67
Tabel 4.3 Fixed Effect Model (FEM)	68
Tabel 4.4 Random Effect Model (REM).....	68
Tabel 4.5 Uji Chow.....	69
Tabel 4.6 Uji Hausman	70
Tabel 4.7 Uji Large Multiplier(LM)	70
Tabel 4.8 Analisis Regresi Data (Random Effect Model)	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2022.....	3
Gambar 1.2 Presentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022	7
Gambar 2.1 Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	47



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Eviews 9. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM Provinsi Jawa tengah tahun 2013- 2022. Sedangkan variabel Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022. Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022. Secara simultan variabel Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, Upah Minimum Regional, dan Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022.

Kata kunci : IPM, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Regional, dan Kemiskinan



ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of government spending, economic growth and poverty on the Human Development Index for Central Java Province for 2013-2022. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance. The type of research used is quantitative research using the Eviews 9 analysis tool. The method used is panel data regression analysis with the Random Effect Model. The research results show that the influence of government expenditure variables in the health and education sectors partially has no effect on the HDI of Central Java Province in 2013-2022. Meanwhile, the Regional Minimum Wage variable has a positive and significant effect on the HDI of Central Java Province in 2013-2022. The Poverty variable has a negative and significant effect on the Human Development Index for Central Java province for 2013-2022. Simultaneously, the variables government expenditure in the health and education sectors, Regional Minimum Wage, and Poverty influence the Human Development Index (HDI) of Central Java Province for 2013-2022.

Keywords: HDI, Government Expenditures, Regional Minimum Wage, and Poverty



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan suatu negara adalah satu alat yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan (Zakaria, 2017). Selain mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pembangunan manusia juga harus diperhatikan oleh negara dalam pendekatan pembangunan negara (Meydiasari & Soejoto, 2017). Kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan negara harus memerhatikan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam kemajuan negara (Anam dkk., 2021).

Pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan kemampuan tersebut. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pembangunan sebenarnya berfokus pada masyarakat sebagai kekayaan yang nyata dalam suatu daerah atau wilayah. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai *“a process of enlarging people’s choices”* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat (M. B. Setiawan & Hakim, 2013). Perkembangan pembangunan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya faktor internal, perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

Paradigma pembangunan saat ini yang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dengan tingkat kualitas manusia sebagai ukuran pembangunan manusia di tiap-tiap negara. Sehingga dibentuk indikator baru yang secara umum berfokus pada pembangunan manusia (M. B. Setiawan & Hakim, 2013). Moris (1979) membangun *the Physical Quality of Life Index (PQLI)*, sedangkan United Nation Development (UNDP) membangun Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan landasan yang dibangun oleh Haq (1996). Konsep ini menempatkan tiga aspek penting kehidupan, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. UNDP menempatkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Dari parameter yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia, meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia (Lie dkk., 2022). UNDP (2023) menjelaskan salah satu manfaat utama dari IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia. Perbandingan IPM antarnegara dapat membedakan kemajuan pembangunan manusia diseluruh dunia yang dapat dilihat dan dipahami dengan mudah. Dengan memperhatikan perbedaan dan masalah tersebut, pembuat kebijakan

dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di negara mereka (I. N. Setiawan dkk., 2022).



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2022

Sumber: BPS tahun 2022

Pada periode tahun 2019-2021 pertumbuhan IPM Indonesia mengalami kelambanan akibat adanya pandemi COVID 19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2022 pandemi COVID 19 mulai menghilang, sehingga capaian IPM Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 72.91, tumbuh 0,86 persen dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya mencapai 0,49 persen dan 0,03 persen pada tahun 2020 (I. N. Setiawan dkk., 2022)

Peningkatan IPM terjadi di setiap wilayah provinsi, pada tahun 2022 IPM Papua masih menjadi wilayah dengan IPM terendah di angka 61,9 dan masih tergolong dalam IPM sedang. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan IPM tertinggi dengan angka 81,65 dan sudah termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Hasil positif juga diraih provinsi Jawa Tengah dengan kenaikan yang

mencapai angka 72,79. Pada tahun 2017, kenaikan IPM Jawa Tengah masuk dalam kategori IPM tinggi dengan angka 70,52 persen yang mana pada tahun-tahun sebelumnya masih dalam kategori IPM sedang. Berikut data perkembangan IPM provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2022.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2015-2022

TAHUN	IPM
2013	68,02
2014	68,78
2015	69.49
2016	69.98
2017	70.52
2018	71.12
2019	71.73
2020	71.87
2021	72.16
2022	72.79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional membutuhkan modal sebagai dasar pembangunan manusia. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi dengan tujuan untuk pembangunan manusia sebagai kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini digunakan untuk sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Baeti, 2013). Menurut Ritonga (2014) dalam mencapai tujuan negara, pemerintah daerah melayani masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan di semua

bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan pengeluaran pemerintah menjadi tiga jenis belanja, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Hal itu menjadi komitmen pemerintah dalam membangun kualitas atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan indikator-indikator yang menjadi dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bidang pendidikan dan kesehatan memainkan peran sentral dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya dan pembangunan manusia. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran yang memadai di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan melakukan investasi dan perbaikan dalam dua bidang tersebut, pemerintah dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, menciptakan masyarakat yang lebih terampil, sehat, dan berdaya saing. Alokasi belanja pemerintah di sektor-sektor ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan hidup layak bagi penduduknya.

Dana biaya diambil dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran pemerintah. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahunnya pemerintahan pusat menetapkan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan pembangunan masing-masing daerah

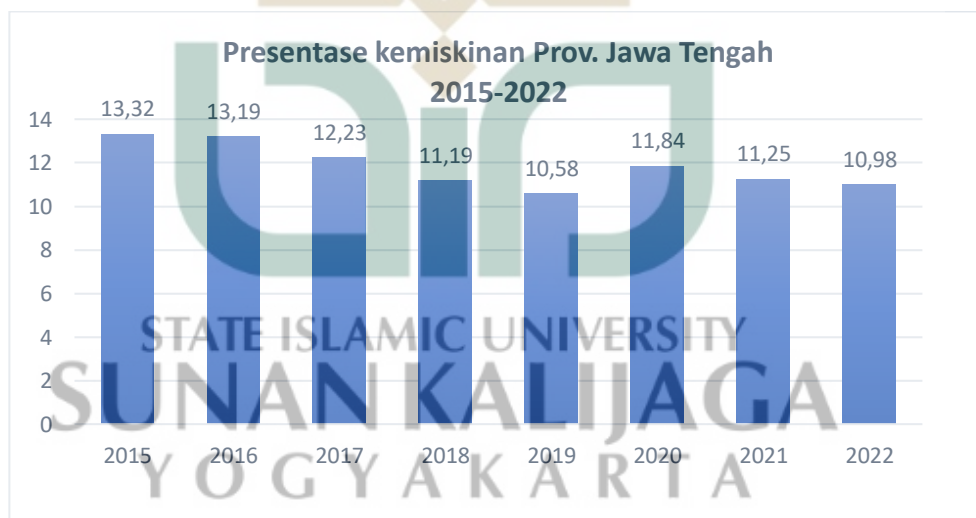
(Mangkoesobroto, 2012). Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mulai berlaku sejak diterbitkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi IPM adalah upah minimum. Penelitian yang dilakukan Sari & Yusniar (2019) menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berarti bahwa kenaikan upah minimum regional akan menaikkan indeks pembangunan manusia. Upah merupakan bentuk balas jasa yang diterima pekerja karena telah memberikan jasanya untuk memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dalam sistem pengupahan dikenal sebagai upah minimum yaitu standar minimum yang dipakai pelaku industri atau pengusaha untuk memberikan upah terhadap pekerja. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional (Bambang, 2013).

Sasaran kebijakan upah minimum adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup dasar bagi pekerja dan keluarganya dapat tercukupi. Tingkat kecukupan hidup dapat diukur dari besarnya upah yang diterima oleh pekerja (Noviani, 2013). Pekerja dengan pendapatan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, sementara mereka yang berpenghasilan rendah akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan

(Tarumigkeng et al, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan seseorang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan dan keterbelakangan ekonomi. Selain itu, perhatian terhadap perubahan upah minimum regional di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di Indonesia, meskipun laju pertumbuhan selalu memberikan dampak positif atau meningkat namun jumlah kemiskinan di Indonesia masih banyak. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki laju pertumbuhan yang meningkat namun penduduk miskin di Jawa Tengah masih banyak (Suliswanto, 2010).



Gambar 1.2 Presentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022

Sumber : BPS provinsi Jawa Tengah 2022

Pada gambar dapat dilihat bahwa kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022 mengalami naik turun, akan tetapi angka kemiskinan masih diatas 10 persen. Walaupun angka kemiskinan Jawa Tengah menurun masih dapat

dikatakan angka kemiskinannya besar, karena masih mencapai lebih dari 10 persen. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang sangat buruk bagi perkembangan sumber daya manusia, yang dimana dapat dilihat dari umur yang pendek jika mengalami kemiskinan. Kemudian masalah kemiskinan juga akan berakibat pada kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan akan terabaikan (*BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017*)

Kemiskinan merupakan persolaaan klasik yang telah ada sejak lama. Kemiskinan merupakan masalah utama bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang yang menyebabkan tingkat kemakmuran negara atau wilayah relatif rendah. Sebagai faktor penting yang mempengaruhi IPM, tingkat kemiskinan harus ditekan dengan tujuan meningkatnya angka IPM, sebaliknya jika tingkat kemiskinan tinggi maka berdampak pada rendahnya IPM. Kemiskinan merupakan aspek yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu prioritas pembangunan negara, yang merupakan satu indikator keberhasilan dalam pembangunan (Muliza dkk., 2017).

Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah 32.800,69 km² yang terdiri 35 kabupaten/kota. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2022 mencapai angka 72,79, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,87 persen atau kenaikan sebanyak 0,63 poin dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021. Peningkatan ini

didukung oleh pertumbuhan positif pada semua komponen penyusun IPM. Dari segi pendidikan, anak-anak berusia 7 tahun di Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12,81 tahun, hampir setara dengan durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 12,77 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat sebanyak 0,18 tahun, dari 7,75 tahun menjadi 7,93 tahun pada tahun 2022 (Dinkesjateng, 2022).

Dari segi kesehatan, bayi yang lahir di Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki harapan hidup mencapai 74,57 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Keseluruhan, peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif dalam aspek pendidikan dan kesehatan, mencerminkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk membahas mengenai pembangunan manusia di Jawa Tengah. Selain itu didalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Regional (UMR), dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berupa:

1. Apakah pengeluaran pemerintah, upah minimum regional dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022?
2. Apakah pengeluaran pemerintah, upah minimum regional, dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum regional, dan Kemiskinan secara parsial terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, upah minimum regional, dan Kemiskinan secara simultan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penyusun, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu

media untuk mengimplementasikan dan menganalisis teori-teori yang telah penulis pelajari selama bangku kuliah dalam permasalahan ekonomi.

2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan perbandingan bagi pihak-pihak yang melakukan studi serupa.
3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan dalam rangka penyusunan dan pengambilan kebijakan di bidang yang bersangkutan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini seluruhnya terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan yang isinya tentang latar belakang asal penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang akan dijelaskan mengenai fenomena dan permasalahan yang terjadi yang kemudian dijadikan landasan penelitian yang didukung dengan data yang sudah diperoleh, teori, serta penelitian terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang landasan-landasan teori yang digunakan dan telaah pustaka yang mana keduanya merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan bahan rujukan. Selain itu di bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang diskripsi penelitian dan menjelaskan setiap variabelnya. Pada bab ini juga menjelaskan jenis penelitian,

definisi oprasional variabel, sumber dan jenis data, serta alat analisis yang digunakan.

Bab VI Hasil dan Pembahasan yang berisis tentang gambaran-gambaran umum penelitian, model analisis data yang digunakan, hasil analisis, serta pemaparan hasil dari bahasan yang sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah di bab pertama.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil yang telah diteliti serta keterbatasan penelitian. Dalam bab ini juga berisi saran terhadap pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Fixed Effect Model*. Melihat pembahasan yang dijelaskan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Melihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi di bidang kesehatan harus mendapat perhatian, khususnya dari alokasi belanja pemerintah daerah.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan
3. Upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai upah minimum regional menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 1,32 persen. Artinya setiap angka kenaikan upah minimum regional sebesar 1 persen maka IPM mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen.
4. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini menunjukkan hubungan berlawanan arah, yang mana ketika angka kemiskinan mengalami peningkatan maka IPM

menurun. Koefisien kemiskinan terhadap IPM sebesar -0,69, dengan ini dapat diartikan ketika angka kemiskinan naik sebesar 1 persen maka IPM mengalami penurunan sebesar 69 persen.

5. Secara simulatan variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, UMR, dan kemiskinan) berpengaruh terhadap IPM provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2016.
6. Berdasarkan hasil regresi di peroleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,40, yang artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu IPM, sebesar 40% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak di sertakan dalam model.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diulas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah:

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak hanya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memperhatikan program-program yang dapat membantu meningkatkan standar pembangunan manusia di setiap wilayah..
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang tepat terkait UMR, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera. Semakin sejahtera

masyarakat akan meningkatkan kualitas dan kuantitas disegala bidang, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.

3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, seperti halnya kebijakan fiskal, ketimpangan distribusi pendapatan, ataupun angka pengangguran. Sehingga dapat mencerminkan yang sebenarnya dan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang terjadi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah model penelitian serta cakupan data yang akan digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, N. A. (2008). PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI ASING, DAN EFISIENSI PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA ASEAN. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 10(3), 261–296. <https://doi.org/10.21098/bemp.v10i3.226>
- Anam, M. S., Inawati, Y., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia, Rosia, R., & Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia. (2021). FACTORS AFFECTING THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN CENTRAL JAVA PROVINCE. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 6(1), 12–22. <https://doi.org/10.31002/rep.v6i1.3653>
- Asikin, Z., Wahab, A., Husni, L., & Ashyihadi, Z. (2016). *Dasar-dasar hukum perburuhan* (Cetakan ke-11). PT RajaGrafindo Persada.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & W, H. K. (2013). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21009/JPEB.001.1.5>
- Astuti, A. M. (2010). Fixed effect model pada regresi data panel. *Beta: Jurnal Tadris Matematika*, 3(2), 134–145.
- Baeti, N. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>
- Bakti, G. P., & Kodoatie, J. M. (2012). ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), Article 1.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2015). <https://jateng.bps.go.id/publication/2015/12/17/bb5a6b2a85faa944de66d9a2/booklet-indeks-pembangunan-manusia-metode-baru.html>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2017). <https://jateng.bps.go.id/publication.html>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2022). <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>
- Caraka, R. (2019). Pemodelan Regresi Panel pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p06>
- dinkesjateng. (2022). LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022—Penelusuran Google.

https://www.google.com/search?q=LAPORAN+PERTANGGUNGJAWABAN+PELAKSANAAN+APBD+DINAS+KESEHATAN+PROVINSI+JAWA+TENGAH+TAHUN+ANGGARAN+2022&rlz=1C1CHBD_enID1049ID1049&oq=LAPORAN+PERTANGGUNGJAWABAN+PELAKSANAAN+APBD+DINAS+KESEHATAN+PROVINSI+JAWA+TENGAH+TAHUN+ANGGARAN+2022&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDE1MTlqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan / Apakah yang disebut dengan belanja wajib? (t.t.). Diambil 9 Januari 2024, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>

GHOZALI, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (Cet. VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guritno, M. (1993). *Ekonomi Publik*. BPFPE, Yogyakarta.

Haq, M. ul, & Haq, M. ul (Ed.). (1996). *Refleksi Pembangunan Manusia*. Oxford University Press.

Hasang, I., & Nur, M. (2020). *PEREKONOMIAN INDONESIA*. Ahlimedia Book. *Human Development Report 1990*. (1990). UNDP. <https://www.undp.org/publications/human-development-report-1990>

Irmayanti, I., & Bato, A. R. (2017). Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 4(1), 56–66.

Kadarisman, M. (2012). *Manajemen Kompensasi*. RajaGrafindo Persada.

Lie, D. D., Nainggolan, E., Nainggolan, N. T., Sembiring, L. D., & Silitonga, H. P. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Cv. Azka Pustaka.

Mangkoeseobroto, G. (2012). *Ekonomi Publik / Guritno Mangkoeseobroto* (Yogyakarta). BPFPE. [//library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2338](http://library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2338)

Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844>

Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v1n2.p116-126>

Michael P. Todaro, S. C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2*. Erlangga.

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). ANALISIS PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PDRB TERHADAP IPM DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Munandar, A. (2017). ANALISIS REGRESI DATA PANEL PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA “ NEGARA ASIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v8i1.246>
- Nations, U. (1995). Human Development Report 1995. Dalam *Human Development Reports*. United Nations. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1995>
- Nations, U. (1996). Human Development Report 1996. Dalam *Human Development Reports*. United Nations. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1996>
- Perlambang, H. (2010). ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, SUKU BUNGA SBI, NILAI TUKAR TERHADAP TINGKAT INFLASI. *Media Ekonomi*, 49–68. <https://doi.org/10.25105/me.v18i2.2251>
- Rama, A., & Makhlani, M. (2013). PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH. *Dialog*, 36. <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>
- Setiawan, I. N., Kristiani, S. N., Nurarifin, Delyana, S., Setyawati, N., & Arsyi, F. A. (2022). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Economia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3610>
- Suparmoko, M. (2015). *Pengantar Ekonomika Makro*. BPF.
- Syam, S. (2015). Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.1153>
- Todaro, M. P. (1995). *Ekonomi Untuk Negara- negara Berkembang*.
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Bisnis; Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen & Akuntansi* (2 ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- UNDP. (2023a). *Human Development Index (HDI)*. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- Usmaliadanti, C., & Handayani, H. R. (2011). ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKOR PENDIDIKAN

DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009 [Other, Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/30995/>

Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(1), 25–42. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>

Zakaria, R. (2017). *PENGARUH TINGKAT JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016*.



LAMPIRAN

Tabel Data Panel 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022

KAB/KOTA	TAHUN	Y (IPM)	X1 (KSHTN)	X2 (PNDKN)	X3(UMR)	X4(KMSKN)
Kab Banjarnegara	2013	62,84	149.480.395.918	446.748.368.369	835.000	18,71
Kab Banjarnegara	2014	63,15	156.755.080.895	624.945.471.515	920.000	17,77
Kab Banjarnegara	2015	64,73	51.509.127.255	47.332.700.200	1.112.500	18,37
Kab Banjarnegara	2016	65,52	399.150.617.764	1.416.880.218.982	1.265.000	17,46
Kab Banjarnegara	2017	65,86	284.422.977.354	756.508.828.017	1.370.000	17,21
Kab Banjarnegara	2018	66,54	300.952.989.436	56.465.938.534	1.490.000	15,46
Kab Banjarnegara	2019	67,34	334.308.173.680	733.172.229.357	1.610.000	14,76
Kab Banjarnegara	2020	67,45	42.799.264.194	48.571.493.840	1.748.000	15,64
Kab Banjarnegara	2021	67,86	30.695.818.632	66.286.899.101	1.805.000	16,23
Kab Banjarnegara	2022	68,61	533.904.653	61.810.835.456	1.819.835	15,20
Kab Banyumas	2013	68,55	325.691.065.228	779.031.250.096	877.500	18,44
Kab Banyumas	2014	69,25	389.294.245.755	1.067.187.585.914	1.000.000	17,45
Kab Banyumas	2015	69,89	41.522.243.581	70.767.591.397	1.100.000	17,52
Kab Banyumas	2016	70,49	52.653.880.078	95.239.756.112	1.350.000	17,23
Kab Banyumas	2017	70,75	585.388.007.763	1.123.975.611.189	1.461.400	17,05
Kab Banyumas	2018	71,30	595.237.950.989	60.775.181.596	1.589.000	13,50
Kab Banyumas	2019	71,96	643.824.214.970	1.139.967.040.413	1.750.000	12,53
Kab Banyumas	2020	71,98	78.757.655.350	66.597.024.591	1.900.000	13,26
Kab Banyumas	2021	72,44	146.687.199.566	76.326.091.349	1.970.000	13,66
Kab Banyumas	2022	73,17	95.516.961.425	52.014.039.111	1.983.261	12,84
Kab Batang	2013	63,6	154.726.457.375	390.242.647.041	970.000	11,96
Kab Batang	2014	64,07	175.725.805.947	443.206.060.747	1.146.000	11,13
Kab Batang	2015	65,46	45.713.878.535	27.118.106.269	1.270.000	11,27
Kab Batang	2016	66,38	233.344.230.477	505.999.695.887	1.467.500	11,04
Kab Batang	2017	67,35	263.930.327.188	492.237.135.158	1.603.000	10,80
Kab Batang	2018	67,86	298.611.254.206	37.187.467.107	1.749.900	8,69
Kab Batang	2019	68,42	311.304.451.265	561.817.591.857	1.900.000	8,35
Kab Batang	2020	68,65	42.907.480.287	63.497.646.552	2.061.700	9,13
Kab Batang	2021	68,92	44.621.894.122	59.306.294.960	2.129.117	9,68
Kab Batang	2022	69,45	17.786.270.911	39.379.863.522	2.135.535	8,98
Kab Blora	2013	65,37	160.741.792.192	580.186.643.668	932.000	14,64
Kab Blora	2014	65,84	178.995.257.999	646.071.295.804	1.009.000	13,66
Kab Blora	2015	66,22	70.208.368.300	53.166.444.460	1.180.000	13,52
Kab Blora	2016	66,61	295.686.629.627	698.827.447.915	1.328.500	13,33
Kab Blora	2017	67,52	2.920.658.420	712.440.083.014	1.438.100	13,04
Kab Blora	2018	67,95	343.906.213.409	68.638.127.826	1.564.000	11,90
Kab Blora	2019	68,65	362.372.030.924	758.993.981.065	1.690.000	11,32

Kab Blora	2020	68,84	61.489.216.086	77.973.259.700	1.834.000	11,96
Kab Blora	2021	69,37	68.715.686.013	65.006.971.920	1.894.000	12,39
Kab Blora	2022	69,95	48.698.792.015	76.435.514.865	1.904.196	11,53
Kab Boyolali	2013	69,81	210.211.086.476	537.975.050.306	895.000	13,27
Kab Boyolali	2014	70,34	229.734.297.899	763.026.360.041	1.116.000	12,36
Kab Boyolali	2015	71,74	54.746.661.950	46.546.119.900	1.197.800	12,45
Kab Boyolali	2016	72,18	66.837.885.256	180.409.054.686	1.403.500	12,09
Kab Boyolali	2017	72,64	330.737.071.929	750.223.105.531	1.519.289	11,96
Kab Boyolali	2018	73,22	368.476.977.761	51.202.260.644	1.651.650	10,04
Kab Boyolali	2019	73,80	377.836.036.255	768.086.524.153	1.790.000	9,53
Kab Boyolali	2020	74,25	149.180.577.584	56.339.769.283	1.942.500	10,18
Kab Boyolali	2021	74,40	124.429.286.059	83.127.574.564	2.000.000	10,62
Kab Boyolali	2022	74,97	215.840.590.008	56.513.438.134	2.010.299	9,82
Kab Brebes	2013	61,87	228.862.861.934	615.827.950.983	859.000	20,82
Kab Brebes	2014	62,55	251.802.324.793	838.458.503.085	1.000.000	20
Kab Brebes	2015	63,18	81.507.472.000	50.589.412.000	1.166.550	19,79
Kab Brebes	2016	63,98	487.971.798.293	914.141.399.267	1.310.000	19,47
Kab Brebes	2017	64,86	237.461.489.759	794.168.559.621	1.418.100	19,14
Kab Brebes	2018	65,68	464.655.465.469	75.068.002.495	1.542.000	17,17
Kab Brebes	2019	66,12	479.655.172.612	1.017.858.584.110	1.665.850	16,22
Kab Brebes	2020	66,11	60.683.619.019	126.779.713.098	1.807.614	17,03
Kab Brebes	2021	66,32	61.785.233.336	80.308.986.775	1.866.723	17,43
Kab Brebes	2022	67,03	101.107.365.140	69.305.509.925	1.885.019	16,05
Kab Cilacap	2013	66,8	260.092.732.668	735.370.013.552	887.667	15,24
Kab Cilacap	2014	67,25	263.939.214.057	956.769.650.369	1.016.667	14,21
Kab Cilacap	2015	67,77	29.316.250.900	59.168.832.358	1.195.667	14,39
Kab Cilacap	2016	68,60	446.652.943.386	1.102.472.316.563	1.527.000	14,12
Kab Cilacap	2017	68,90	476.322.854.951	1.094.741.502.406	1.693.689	13,94
Kab Cilacap	2018	69,56	495.135.020.934	93.957.480.677	1.841.209	11,25
Kab Cilacap	2019	69,98	583.793.338.371	1.124.044.689.986	1.989.058	10,73
Kab Cilacap	2020	69,95	62.943.545.012	83.868.422.626	2.158.327	11,46
Kab Cilacap	2021	70,42	110.342.194.231	94.322.777.650	2.228.904	11,67
Kab Cilacap	2022	70,99	28.156.400.594	161.441.495.479	2.230.731	11,02
Kab Demak	2013	68,38	187.704.304.093	447.213.627.138	995.000	15,72
Kab Demak	2014	68,95	163.797.884.734	572.363.517.212	1.280.000	14,6
Kab Demak	2015	67,77	73.493.585.353	154.145.944.010	1.535.000	14,44
Kab Demak	2016	68,60	268.262.113.306	613.340.709.034	1.745.000	14,10
Kab Demak	2017	68,90	291.332.962.556	640.779.538.279	1.900.000	13,41
Kab Demak	2018	69,56	302.509.973.547	53.296.699.880	2.065.490	12,54
Kab Demak	2019	69,98	509.788.138.945	658.460.873.679	2.240.000	11,86
Kab Demak	2020	69,95	47.611.608.134	56.305.815.069	2.432.000	12,54
Kab Demak	2021	70,42	88.988.542.369	62.613.088.811	2.511.526	12,92
Kab Demak	2022	70,99	95.282.274.114	80.740.102.140	2.513.005	12,09
Kab Grobogan	2013	67,43	277.277.008.075	522.755.959.993	842.000	14,87
Kab Grobogan	2014	67,77	302.625.470.999	570.545.930.616	935.000	13,86

Kab Grobogan	2015	69,75	317.261.316.890	46.052.583.213	1.160.000	13,68
Kab Grobogan	2016	70,10	345.572.824.617	729.528.274.694	1.305.000	13,57
Kab Grobogan	2017	70,41	372.539.682.502	817.938.412.726	1.435.000	13,27
Kab Grobogan	2018	71,26	424.610.649.344	54.641.470.440	1.560.000	12,31
Kab Grobogan	2019	71,87	451.187.352.022	854.365.763.876	1.685.500	11,77
Kab Grobogan	2020	72,22	51.684.763.428	86.573.604.620	1.830.000	12,46
Kab Grobogan	2021	72,57	62.413.259.696	76.640.655.692	1.890.000	12,74
Kab Grobogan	2022	73,36	77.164.021.906	64.220.032.316	1.894.032	11,80
Kab Jepara	2013	69,11	178.449.388.771	259.093.527.418	875.000	9,23
Kab Jepara	2014	69,61	198.742.282.782	288.557.105.450	1.000.000	8,55
Kab Jepara	2015	68,05	129.491.496.000	206.828.431.000	1.150.000	8,50
Kab Jepara	2016	68,52	283.753.263.046	466.949.441.367	1.350.000	8,35
Kab Jepara	2017	68,87	359.250.753.045	754.791.642.839	1.600.000	8,12
Kab Jepara	2018	69,32	386.491.195.813	50.039.532.095	1.739.360	7,00
Kab Jepara	2019	69,86	322.985.322.762	194.087.850.805	1.879.031	6,66
Kab Jepara	2020	69,87	76.001.939.817	37.814.188.680	2.040.000	7,17
Kab Jepara	2021	70,41	24.400.761.984	35.759.992.573	2.107.000	7,44
Kab Jepara	2022	70,97	31.471.235.330	57.210.840.401	2.108.403	6,88
Kab Karanganyar	2013	73,33	163.264.714.115	488.787.082.871	896.500	13,58
Kab Karanganyar	2014	73,89	172.967.486.823	775.383.225.119	1.060.000	12,62
Kab Karanganyar	2015	70,02	63.092.116.107	64.493.536.748	1.226.000	12,46
Kab Karanganyar	2016	70,25	78.837.118.265	129.135.845.331	1.420.000	12,49
Kab Karanganyar	2017	70,79	280.127.320.003	763.394.721.559	1.560.000	12,28
Kab Karanganyar	2018	71,38	285.661.985.260	37.772.141.476	1.696.000	10,01
Kab Karanganyar	2019	71,88	324.245.629.448	823.812.146.665	1.833.000	9,55
Kab Karanganyar	2020	71,99	27.973.842.848	47.739.182.159	1.989.000	10,28
Kab Karanganyar	2021	72,36	31.490.458.925	33.635.758.756	2.054.040	10,68
Kab Karanganyar	2022	73,15	90.278.467.635	37.169.894.666	2.064.313	9,85
Kab Kebumen	2013	64,86	197.711.226.418	690.895.820.949	849.000	21,32
Kab Kebumen	2014	65,67	282.768.545.832	911.580.267.206	910.000	20,5
Kab Kebumen	2015	74,26	41.460.730.000	283.464.521.000	1.165.000	20,44
Kab Kebumen	2016	74,90	112.299.361.574	167.359.892.347	1.300.000	19,86
Kab Kebumen	2017	75,22	379.444.079.156	1.036.769.005.180	1.445.000	19,60
Kab Kebumen	2018	75,54	408.338.923.452	49.025.610.701	1.573.000	17,47
Kab Kebumen	2019	75,89	460.903.754.456	1.007.669.863.355	1.700.000	16,82
Kab Kebumen	2020	75,86	61.807.984.766	54.805.452.440	1.845.000	17,59
Kab Kebumen	2021	75,99	79.737.404.777	52.436.588.903	1.905.400	17,83
Kab Kebumen	2022	76,58	82.103.960.438	46.731.275.909	1.911.850	16,41
Kab Kendal	2013	67,98	174.431.076.209	462.228.086.877	953.100	12,68
Kab Kendal	2014	68,46	196.971.712.952	617.649.395.657	1.206.000	11,8
Kab Kendal	2015	66,87	34.925.463.832	52.850.126.599	1.383.450	11,62
Kab Kendal	2016	67,41	311.773.169.869	695.793.369.106	1.639.600	11,37
Kab Kendal	2017	68,29	330.833.231.737	733.519.630.014	1.774.867	11,10
Kab Kendal	2018	68,80	376.324.873.682	45.595.460.023	1.929.458	9,84
Kab Kendal	2019	69,60	402.433.127.096	787.453.350.255	2.084.393	9,41

Kab Kendal	2020	69,81	33.545.741.588	33.254.814.243	2.261.775	9,99
Kab Kendal	2021	70,05	35.201.674.022	38.481.687.928	2.335.735	10,24
Kab Kendal	2022	70,79	71.881.575.147	50.746.724.492	2.340.312	9,48
Kab Klaten	2013	72,42	151.827.446.450	713.623.384.215	871.500	15,6
Kab Klaten	2014	73,19	194.912.095.544	994.095.657.434	1.026.600	14,56
Kab Klaten	2015	69,57	77.111.574.035	212.163.728.000	1.170.000	14,89
Kab Klaten	2016	70,11	240.506.108.327	1.011.690.040.754	1.400.000	14,46
Kab Klaten	2017	70,62	249.527.919.284	875.779.020.635	1.528.500	14,15
Kab Klaten	2018	71,28	253.353.147.943	36.196.785.014	1.661.632	12,96
Kab Klaten	2019	71,97	297.270.787.274	858.259.939.025	1.795.061	12,28
Kab Klaten	2020	72,29	32.638.085.463	40.103.902.460	1.947.821	12,89
Kab Klaten	2021	72,50	30.439.380.546	36.905.998.329	2.011.515	13,49
Kab Klaten	2022	73,19	37.110.071.272	26.569.673.405	2.015.623	12,33
Kab Kudus	2013	71,58	179.164.375.320	378.498.307.069	990.000	8,62
Kab Kudus	2014	72	194.481.771.287	556.676.469.580	1.150.000	7,99
Kab Kudus	2015	73,81	52.365.229.000	52.244.312.000	1.380.000	7,73
Kab Kudus	2016	73,97	372.620.166.534	646.897.817.359	1.608.200	7,65
Kab Kudus	2017	74,25	281.076.988.244	684.773.115.555	1.740.900	7,59
Kab Kudus	2018	74,79	392.019.629.855	88.521.174.520	1.892.500	6,98
Kab Kudus	2019	75,29	408.120.691.196	600.133.079.961	2.044.468	6,68
Kab Kudus	2020	75,56	36.511.604.153	65.954.114.531	2.218.452	7,31
Kab Kudus	2021	76,12	72.799.547.025	41.498.293.524	2.290.995	7,60
Kab Kudus	2022	76,95	180.205.729.673	77.178.969.804	2.293.058	7,41
Kab Magelang	2013	65,86	142.459.626.726	460.527.978.522	942.000	13,96
Kab Magelang	2014	66,35	126.139.455.699	826.258.789.486	1.152.000	12,98
Kab Magelang	2015	72,72	23.579.551.000	52.698.986.287	1.255.000	13,07
Kab Magelang	2016	72,94	266.797.166.571	735.547.046.898	1.410.000	12,67
Kab Magelang	2017	73,84	292.588.737.103	838.470.904.641	1.570.000	12,42
Kab Magelang	2018	74,58	391.419.763.464	50.201.622.293	1.742.000	11,23
Kab Magelang	2019	74,94	422.006.435.562	770.614.642.843	1.882.000	10,67
Kab Magelang	2020	75,00	92.630.843.085	64.777.418.717	2.042.200	11,27
Kab Magelang	2021	75,16	96.007.689.224	53.174.028.545	2.075.000	11,91
Kab Magelang	2022	75,89	110.747.082.847	65.439.900.951	2.081.807	11,09
Kab Pati	2013	66,47	242.366.464.533	582.971.703.188	927.600	12,94
Kab Pati	2014	66,99	136.527.806.878	895.637.217.557	1.013.027	12,06
Kab Pati	2015	67,13	60.370.821.317	26.755.629.757	1.176.500	11,95
Kab Pati	2016	67,85	421.024.129.801	855.367.036.080	1.310.000	11,65
Kab Pati	2017	68,39	466.252.559.641	853.715.549.304	1.420.500	11,38
Kab Pati	2018	69,11	434.271.687.861	39.337.007.844	1.585.000	9,90
Kab Pati	2019	69,87	507.415.278.627	857.476.919.333	1.742.000	9,46
Kab Pati	2020	69,87	44.189.890.994	64.905.013.776	1.891.000	10,08
Kab Pati	2021	70,12	37.803.356.506	60.705.147.574	1.953.000	10,21
Kab Pati	2022	70,85	31.499.384.932	46.216.529.941	1.968.339	9,33
Kab Pekalongan	2013	66,26	219.192.920.131	456.674.000.789	962.000	13,51
Kab Pekalongan	2014	66,98	262.433.619.282	488.098.000.761	1.145.000	12,57

Kab Pekalongan	2015	68,51	42.486.752.062	39.661.614.129	1.271.000	12,84
Kab Pekalongan	2016	69,03	241.782.049.969	554.303.646.573	1.463.000	12,90
Kab Pekalongan	2017	70,12	385.415.111.104	692.710.772.141	1.583.698	12,61
Kab Pekalongan	2018	70,71	402.534.680.063	54.446.151.801	1.721.638	10,06
Kab Pekalongan	2019	71,35	416.610.184.786	735.798.229.372	1.859.885	9,71
Kab Pekalongan	2020	71,77	53.573.572.502	79.368.138.722	2.018.161	10,19
Kab Pekalongan	2021	72,28	35.992.056.839	55.819.984.572	2.084.155	10,57
Kab Pekalongan	2022	73,14	40.774.693.351	45.634.955.390	2.094.646	9,67
Kab Pemalang	2013	61,81	202.002.442.396	585.894.895.746	908.000	19,27
Kab Pemalang	2014	62,35	203.712.404.803	740.212.112.994	1.066.000	18,44
Kab Pemalang	2015	67,40	78.839.000.700	34.244.744.181	1.193.400	18,30
Kab Pemalang	2016	67,71	297.122.265.510	815.911.807.837	1.325.000	17,58
Kab Pemalang	2017	68,40	301.830.667.064	907.817.242.901	1.460.000	17,37
Kab Pemalang	2018	68,97	320.960.471.627	87.316.134.720	1.588.000	16,04
Kab Pemalang	2019	69,71	373.219.476.915	917.133.502.319	1.718.000	15,41
Kab Pemalang	2020	69,63	42.011.368.229	98.450.479.309	1.865.000	16,02
Kab Pemalang	2021	70,11	28.365.679.259	74.780.202.825	1.926.000	16,56
Kab Pemalang	2022	70,81	37.495.112.302	41.363.949.221	1.940.890	15,06
Kab Purbalingga	2013	65,53	171.710.623.814	420.231.467.617	896.005	20,53
Kab Purbalingga	2014	66,23	207.623.306.775	515.019.240.864	1.023.000	19,75
Kab Purbalingga	2015	63,70	53.408.972.000	49.186.979.000	1.101.600	19,70
Kab Purbalingga	2016	64,17	304.091.429.000	635.052.014.640	1.377.500	18,98
Kab Purbalingga	2017	65,04	296.128.405.972	701.608.235.478	1.522.500	18,80
Kab Purbalingga	2018	65,67	323.710.546.201	32.032.928.180	1.655.200	15,62
Kab Purbalingga	2019	66,32	359.660.280.616	729.713.931.084	1.788.500	15,03
Kab Purbalingga	2020	66,32	36.039.425.035	50.123.199.038	1.940.800	15,90
Kab Purbalingga	2021	66,56	38.854.306.034	55.128.582.430	1.988.000	16,24
Kab Purbalingga	2022	67,19	51.084.489.940	101.967.443.850	1.996.814	15,30
Kab Purworejo	2013	69,77	167.398.604.385	446.457.101.181	835.000	15,44
Kab Purworejo	2014	70,12	193.434.304.473	659.989.496.762	975.000	14,41
Kab Purworejo	2015	67,03	39.214.839.317	60.055.590.249	1.157.500	14,27
Kab Purworejo	2016	67,48	296.122.790.731	684.773.220.593	1.324.600	13,91
Kab Purworejo	2017	67,72	348.560.697.017	666.102.732.684	1.433.900	13,81
Kab Purworejo	2018	68,41	317.706.908.434	33.596.868.627	1.560.000	11,67
Kab Purworejo	2019	68,99	371.738.602.938	648.225.766.240	1.686.000	11,45
Kab Purworejo	2020	68,97	88.121.196.854	35.736.666.397	1.835.000	11,78
Kab Purworejo	2021	69,15	41.646.760.772	67.305.465.309	1.895.000	12,40
Kab Purworejo	2022	69,54	89.546.643.422	42.112.368.252	1.906.781	11,53
Kab Rembang	2013	66,84	157.612.079.235	341.124.812.465	896.000	20,97
Kab Rembang	2014	67,4	189.599.689.802	410.356.610.616	985.000	19,5
Kab Rembang	2015	70,37	46.122.811.562	29.402.488.908	1.120.000	19,28
Kab Rembang	2016	70,66	71.015.214.912	123.614.626.493	1.300.000	18,54
Kab Rembang	2017	71,31	287.405.764.069	542.307.603.576	1.408.000	18,35
Kab Rembang	2018	71,87	268.888.757.384	59.552.281.204	1.535.000	15,41
Kab Rembang	2019	72,50	310.060.390.781	573.033.551.515	1.660.000	14,95

Kab Rembang	2020	72,68	47.697.113.295	45.931.735.183	1.802.000	15,60
Kab Rembang	2021	72,98	31.744.346.383	66.274.139.869	1.861.000	15,80
Kab Rembang	2022	73,60	38.848.923.688	76.108.891.318	1.874.322	14,65
Kab Semarang	2013	71,29	221.182.068.356	434.874.235.432	1.051.000	8,51
Kab Semarang	2014	71,65	270.779.709.713	532.580.028.083	1.208.200	8,05
Kab Semarang	2015	68,18	50.821.384.734	28.977.416.175	1.419.000	8,15
Kab Semarang	2016	68,60	335.197.007.659	686.210.573.781	1.610.000	7,99
Kab Semarang	2017	68,95	397.353.374.310	701.916.802.914	1.745.000	7,78
Kab Semarang	2018	69,46	427.082.215.708	28.868.581.999	1.900.000	7,29
Kab Semarang	2019	70,15	444.315.040.652	746.814.197.598	2.055.000	7,04
Kab Semarang	2020	70,02	45.048.542.937	59.033.203.072	2.229.881	7,51
Kab Semarang	2021	70,43	39.889.635.566	45.698.908.871	2.302.798	7,82
Kab Semarang	2022	71,00	63.769.559.387	47.800.070.058	2.311.254	7,27
Kab Sragen	2013	69,95	210.240.158.641	517.987.579.884	864.000	15,93
Kab Sragen	2014	70,52	253.293.092.787	624.060.964.291	960.000	14,87
Kab Sragen	2015	71,89	50.186.557.000	33.897.206.000	1.105.000	14,86
Kab Sragen	2016	72,40	334.887.017.803	762.821.252.299	1.300.000	14,38
Kab Sragen	2017	73,20	344.964.632.801	770.050.773.762	1.422.586	14,02
Kab Sragen	2018	73,61	366.177.979.526	31.317.208.663	1.546.493	13,12
Kab Sragen	2019	74,14	390.081.782.958	716.567.522.038	1.673.500	12,79
Kab Sragen	2020	74,10	106.242.995.830	32.199.723.646	1.815.915	13,38
Kab Sragen	2021	74,24	82.417.262.265	35.021.797.040	1.829.500	13,83
Kab Sragen	2022	74,67	88.031.658.412	26.610.083.359	1.839.429	12,94
Kab Sukoharjo	2013	73,22	175.997.143.586	463.275.461.067	902.000	9,87
Kab Sukoharjo	2014	73,76	209.639.313.596	551.831.397.292	1.150.000	9,18
Kab Sukoharjo	2015	71,10	76.024.660.000	36.835.218.000	1.223.000	9,26
Kab Sukoharjo	2016	71,43	159.643.455.803	724.286.923.843	1.396.000	9,07
Kab Sukoharjo	2017	72,40	274.515.553.910	683.062.818.050	1.513.000	8,75
Kab Sukoharjo	2018	72,96	296.981.144.339	44.985.926.687	1.648.000	7,41
Kab Sukoharjo	2019	73,43	314.764.376.740	692.861.650.404	1.783.500	7,14
Kab Sukoharjo	2020	73,95	42.232.026.319	44.828.787.031	1.938.000	7,68
Kab Sukoharjo	2021	74,08	34.258.431.085	42.103.732.230	1.986.450	8,23
Kab Sukoharjo	2022	74,65	24.636.876.449	35.723.780.356	1.998.153	7,61
Kab Tegal	2013	63,5	238.710.791.634	496.691.832.243	850.000	10,58
Kab Tegal	2014	64,1	248.140.293.471	782.461.695.244	1.000.000	9,87
Kab Tegal	2015	74,53	92.896.787.552	34.597.300.768	1.155.000	10,09
Kab Tegal	2016	75,06	17.795.785.091	112.839.323.847	1.373.000	10,10
Kab Tegal	2017	75,56	318.206.842.824	431.648.273.612	1.487.000	9,90
Kab Tegal	2018	76,07	394.108.438.658	76.690.477.440	1.617.000	7,94
Kab Tegal	2019	76,84	461.371.311.374	858.736.743.760	1.747.000	7,64
Kab Tegal	2020	76,98	64.405.908.282	62.766.481.803	1.896.000	8,14
Kab Tegal	2021	77,13	123.386.447.828	78.695.529.888	1.958.000	8,60
Kab Tegal	2022	77,94	73.491.712.165	82.698.462.000	1.968.446	7,90
Kab Temanggung	2013	65,52	177.686.911.766	310.832.584.047	940.000	12,42
Kab Temanggung	2014	65,97	203.428.949.800	519.974.049.694	1.050.000	11,55

Kab Temanggung	2015	65,04	58.564.323.684	37.052.994.729	1.178.000	11,76
Kab Temanggung	2016	65,84	19.611.115.690	17.349.049.752	1.313.000	11,60
Kab Temanggung	2017	66,44	332.275.407.834	550.725.033.972	1.431.500	11,46
Kab Temanggung	2018	67,33	289.855.435.880	32.169.797.238	1.557.000	9,87
Kab Temanggung	2019	68,24	368.910.500.845	526.048.519.592	1.682.027	9,42
Kab Temanggung	2020	68,39	30.089.682.738	47.795.832.140	1.825.200	9,96
Kab Temanggung	2021	68,79	81.795.869.028	65.072.216.543	1.885.000	10,17
Kab Temanggung	2022	69,53	122.459.080.837	74.449.377.375	1.887.832	9,33
Kab Wonogiri	2013	66,4	161.860.024.820	577.475.759.223	830.000	14,02
Kab Wonogiri	2014	66,77	184.569.575.984	658.497.712.080	954.000	13,09
Kab Wonogiri	2015	67,07	48.804.013.700	23.756.467.345	1.101.000	12,98
Kab Wonogiri	2016	67,60	79.205.222.725	617.340.083.464	1.293.000	13,12
Kab Wonogiri	2017	68,34	281.847.655.770	908.853.082.525	1.401.000	12,90
Kab Wonogiri	2018	68,83	351.518.681.213	55.224.974.012	1.542.000	10,75
Kab Wonogiri	2019	69,56	154.871.050.576	890.198.815.278	1.655.000	10,25
Kab Wonogiri	2020	69,57	27.972.323.542	61.102.804.972	1.797.000	10,86
Kab Wonogiri	2021	69,88	66.092.639.829	72.271.174.707	1.827.000	11,55
Kab Wonogiri	2022	70,77	61.978.492.117	38.211.698.788	1.839.043	10,99
Kab Wonosobo	2013	64,57	136.561.973.099	354.931.537.143	880.000	22,08
Kab Wonosobo	2014	65,2	178.148.805.363	448.119.327.248	990.000	21,42
Kab Wonosobo	2015	67,76	49.650.861.745	43.923.297.685	1.166.000	21,45
Kab Wonosobo	2016	68,23	195.214.402.269	585.811.348.136	1.326.000	20,53
Kab Wonosobo	2017	68,66	243.156.288.993	600.407.104.169	1.457.100	20,32
Kab Wonosobo	2018	69,37	292.453.843.661	56.289.632.335	1.585.000	17,58
Kab Wonosobo	2019	69,98	312.808.029.399	640.063.429.271	1.712.500	16,63
Kab Wonosobo	2020	70,25	24.486.239.279	50.988.799.039	1.859.000	17,36
Kab Wonosobo	2021	70,49	40.643.121.010	64.051.989.591	1.920.000	17,67
Kab Wonosobo	2022	71,04	60.038.714.249	55.213.744.477	1.931.285	16,17
Kota Magelang	2013	75,29	161.499.045.212	165.908.689.347	901.500	9,8
Kota Magelang	2014	75,79	174.650.675.128	179.419.417.409	1.037.000	9,14
Kota Magelang	2015	65,70	29.534.627.657	31.335.142.784	1.211.000	9,05
Kota Magelang	2016	66,19	77.638.560.862	44.693.937.111	1.341.000	8,79
Kota Magelang	2017	66,89	276.818.350.100	214.336.017.557	1.453.000	8,75
Kota Magelang	2018	67,81	305.770.396.190	28.194.973.896	1.580.000	7,87
Kota Magelang	2019	68,27	343.165.130.706	205.418.146.220	1.707.000	7,46
Kota Magelang	2020	68,22	48.851.276.492	10.798.549.581	1.853.000	7,58
Kota Magelang	2021	68,43	69.134.322.042	22.331.593.921	1.914.000	7,75
Kota Magelang	2022	68,89	80.783.151.494	8.430.069.429	1.935.913	7,10
Kota Pekalongan	2013	70,82	109.056.835.235	185.278.128.861	980.000	8,26
Kota Pekalongan	2014	71,53	133.149.916.346	225.324.037.443	1.165.000	8,02
Kota Pekalongan	2015	72,69	28.838.149.000	35.704.925.000	1.291.000	8,09
Kota Pekalongan	2016	73,32	81.384.098.366	243.238.077.344	1.500.000	7,92
Kota Pekalongan	2017	73,77	171.120.702.842	259.186.879.282	1.623.750	7,47
Kota Pekalongan	2018	74,24	160.158.754.026	22.200.185.677	1.765.179	6,75
Kota Pekalongan	2019	74,77	200.036.127.388	249.689.222.848	1.906.922	6,60

Kota Pekalongan	2020	74,98	24.978.433.999	18.068.062.698	2.072.000	7,17
Kota Pekalongan	2021	75,40	24.325.518.893	39.738.142.235	2.139.754	7,59
Kota Pekalongan	2022	75,90	45.946.064.594	21.312.013.368	2.156.213	7,00
Kota Salatiga	2013	79,37	118.378.054.401	137.628.039.463	974.000	6,4
Kota Salatiga	2014	79,98	146.156.500.768	175.330.551.025	1.170.000	5,93
Kota Salatiga	2015	80,96	35.070.124.050	42.584.751.300	1.287.000	5,80
Kota Salatiga	2016	81,14	231.671.340.273	217.151.437.090	1.450.953	5,24
Kota Salatiga	2017	81,68	234.708.156.814	203.396.946.188	1.596.845	5,07
Kota Salatiga	2018	82,41	254.319.080.061	23.940.010.513	1.735.930	4,84
Kota Salatiga	2019	83,12	227.445.328.485	211.436.173.567	1.875.325	4,76
Kota Salatiga	2020	83,14	37.383.596.433	43.553.690.558	2.034.915	4,94
Kota Salatiga	2021	83,60	34.631.812.738	10.320.270.898	2.101.457	5,14
Kota Salatiga	2022	84,35	7.844.228.079	12.096.851.447	2.128.523	4,73
Kota Semarang	2013	78,68	307.594.452.627	668.537.174.057	1.209.100	5,25
Kota Semarang	2014	79,24	367.744.695.942	799.269.940.339	1.435.000	5,04
Kota Semarang	2015	68,18	50.821.384.734	28.977.416.175	1.685.000	8,15
Kota Semarang	2016	68,60	335.197.007.659	686.210.573.781	1.909.000	7,99
Kota Semarang	2017	68,95	397.353.374.310	701.916.802.914	2.125.000	7,78
Kota Semarang	2018	69,46	427.082.215.708	28.868.581.999	2.310.088	7,29
Kota Semarang	2019	70,15	444.315.040.652	746.814.197.598	2.498.588	7,04
Kota Semarang	2020	70,02	45.048.542.937	59.033.203.072	2.715.000	7,51
Kota Semarang	2021	70,43	39.889.635.566	45.698.908.871	2.810.025	7,82
Kota Semarang	2022	71,00	63.769.559.387	47.800.070.058	2.835.021	7,27
Kota Surakarta	2013	78,89	162.529.855.875	479.877.985.456	915.900	11,74
Kota Surakarta	2014	79,34	110.914.098.437	619.596.648.816	1.145.000	10,95
Kota Surakarta	2015	80,14	40.654.688.839	56.691.164.476	1.222.400	10,89
Kota Surakarta	2016	80,76	156.395.870.387	666.857.864.671	1.418.000	10,88
Kota Surakarta	2017	80,85	217.985.891.926	578.899.005.732	1.534.985	10,65
Kota Surakarta	2018	81,46	337.176.210.839	81.290.228.154	1.668.700	9,08
Kota Surakarta	2019	81,86	409.407.694.944	587.088.215.776	1.802.700	8,70
Kota Surakarta	2020	82,21	57.245.522.710	92.085.614.350	1.956.200	9,03
Kota Surakarta	2021	82,62	36.531.520.844	103.151.368.678	2.013.810	9,40
Kota Surakarta	2022	83,08	23.488.541.693	69.627.300.178	2.035.720	8,84
Kota Tegal	2013	71,44	166.715.337.584	198.889.819.009	860.000	8,84
Kota Tegal	2014	72,2	227.358.741.226	277.734.875.915	1.044.000	8,54
Kota Tegal	2015	72,96	39.858.163.000	42.392.871.000	1.206.000	8,26
Kota Tegal	2016	73,55	278.946.650.523	304.702.885.621	1.385.000	8,20
Kota Tegal	2017	73,95	301.904.318.259	267.908.527.479	1.499.500	8,11
Kota Tegal	2018	74,44	238.907.950.788	23.601.726.590	1.630.500	7,81
Kota Tegal	2019	74,93	284.368.597.544	281.133.395.442	1.762.000	7,47
Kota Tegal	2020	75,07	53.869.331.283	36.923.180.921	1.925.000	7,80
Kota Tegal	2021	75,52	23.126.530.127	42.244.834.979	1.982.750	8,12
Kota Tegal	2022	76,15	51.529.926.450	28.482.808.609	2.005.930	7,91

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/09/24 Time: 14:55
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.28145	2.036613	38.92810	0.0000
X1	-1.66E-12	9.54E-13	-1.740488	0.0828
X2	1.67E-13	4.20E-13	0.398067	0.6909
X3	1.03E-06	3.93E-07	2.628728	0.0090
X4	-0.819636	0.122271	-6.703451	0.0000

Effects Specification

Common Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/09/24 Time: 16:19
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.94505	1.292907	57.96631	0.0000
X1	-1.55E-12	1.80E-12	-0.863690	0.3884
X2	-3.17E-13	8.30E-13	-0.382179	0.7026
X3	1.29E-06	5.26E-07	2.459799	0.0144
X4	-0.481349	0.055009	-8.750340	0.0000

R-squared	0.276203	Mean dependent var	70.79440
Adjusted R-squared	0.267811	S.D. dependent var	4.225180
S.E. of regression	3.615404	Akaike info criterion	5.422467
Sum squared resid	4509.545	Schwarz criterion	5.477580
Log likelihood	-943.9317	Hannan-Quinn criter.	5.444404
F-statistic	32.91323	Durbin-Watson stat	0.155542
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/09/24 Time: 14:53
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 350
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	77.25113	1.751409	44.10799	0.0000
X1	-1.30E-12	9.28E-13	-1.403395	0.1614
X2	7.48E-14	4.16E-13	0.179867	0.8574
X3	1.32E-06	3.50E-07	3.777927	0.0002
X4	-0.692109	0.098013	-7.061397	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.353022	0.7965
Idiosyncratic random		1.694845	0.2035

Weighted Statistics			
R-squared	0.407994	Mean dependent var	11.17414
Adjusted R-squared	0.401130	S.D. dependent var	2.191425
S.E. of regression	1.695871	Sum squared resid	992.2125
F-statistic	59.44109	Durbin-Watson stat	0.671303
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	37.026541	(34,311)	0.0000
Cross-section Chi-square	566.641532	34	0.0000

Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.417698	4	0.3524

Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	931.9742 (0.0000)	2.411162 (0.1205)	934.3854 (0.0000)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA